

**IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI PROVINSI
JAWA BARAT**

Sarah Ghania^{1*}, Khusnul Khatimah², Viyolanda Azrimultiya³

¹sarahghania@upnvj.ac.id, ²khusnul@upnvj.ac.id, ³viyolanda@upnvj.ac.id

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*Penulis Korespondensi

Received: 2 Januari 2025

Published: 1 Februari 2025

Abstrak

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB Indonesia. Namun, besarnya kontribusi sektor perekonomian Provinsi Jawa Barat ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Hal tersebut tercermin dari capaian beberapa variabel ekonomi yang belum optimal seperti pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yakni data PDRB Jawa Barat dan PDB Indonesia tahun 2010-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis pada penelitian ini adalah Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Jawa Barat dimana sektor-sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$. Sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan LQ dan DLQ antara lain sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya

Kata kunci: Jawa Barat, Sektor unggulan, Location Quotient, Dynamic Location Quotient

Abstract

West Java is one of the provinces that makes a significant contribution to Indonesia's GDP. However, despite the substantial contribution of its economic sectors, this has not translated into improved welfare for its population. This is reflected in several economic indicators, such as per capita income and the open unemployment rate, which have not reached optimal levels. This study aims to identify the leading economic sectors in West Java in order to improve the welfare of its population. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data, specifically GRDP data for West Java and GDP data for Indonesia from 2010 to 2023, sourced from the Central Statistics Agency. The analytical tools applied in this study are Location Quotient (LQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ). The findings reveal that several sectors are considered leading in West Java, with these sectors exhibiting LQ and DLQ values greater than 1. These leading sectors, based on the LQ and DLQ calculations, include manufacturing, electricity and gas supply, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and warehousing, health and social activities, and other services.

Keywords: *West Java, Leading Sectors, Location Quotient, Dynamic Location Quotien*

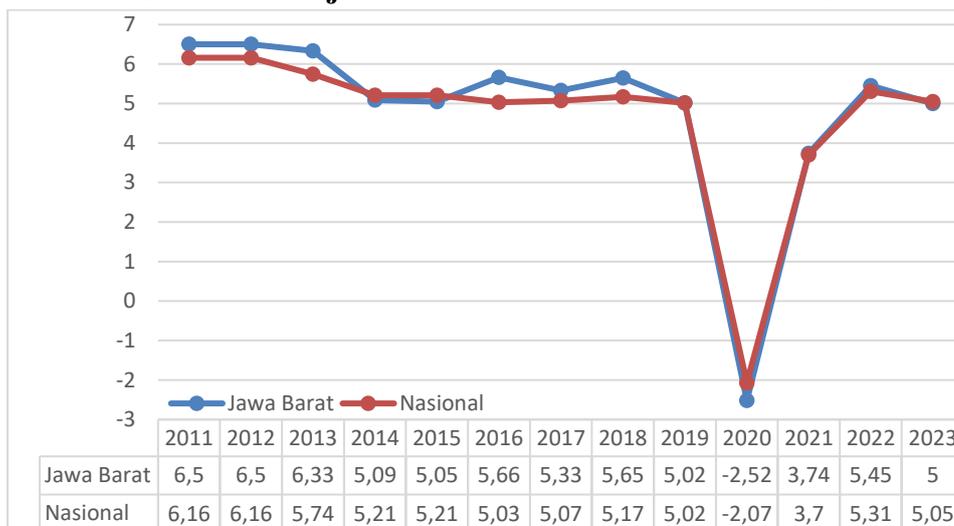
1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip otonomi daerah. Tujuan dari pembangunan daerah itu sendiri adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Menurut (Nur & Rakhman, 2019), salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah penerapan strategi pengembangan yang berbasis potensi lokal (*endowment strategy*). Artinya, keberhasilan pembangunan ekonomi dapat tercapai apabila pelaksanaannya selaras dengan sumber daya yang ada, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.

Suatu wilayah diharapkan dapat memiliki sektor ekonomi unggulan yang dapat mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Rustiadi et al, 2011) yang menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan akan terjadi jika suatu daerah memiliki sektor ekonomi yang mampu mengakselerasi pembangunan serta sektor-sektor lainnya. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mampu mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di wilayahnya, karena hal tersebut bisa menjadi basis bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dari pembangunan daerah (Suranny, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDB Indonesia. Selama periode tahun 2010-2023, Provinsi Jawa Barat telah memberikan sumbangsih sebanyak 13,48% terhadap PDB Indonesia, angka ini menempatkan Provinsi Jawa Barat di urutan ketiga sebagai provinsi dengan PDRB terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara itu, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama tahun 2011-2023 adalah sebesar 4,83%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,63%.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat, industri pengolahan (43,18%), perdagangan besar dan eceran (15,33%) dan pertanian (7,68%) menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode 2010-2023. Lebih lanjut, sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keseluruhan nilai PDB sektor industri nasional yaitu sebesar 24%, angka ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor terbesar bagi sektor pengolahan industri nasional.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat

No	Provinsi	Industri Pengolahan	Kontribusi
1	Aceh	100.690,48	0,31%
2	Sumatera Utara	1.244.955,87	3,85%
3	Sumatera Barat	216.072,16	0,67%
4	RIAU	1.903.652,52	5,88%
5	JAMBI	198.076,96	0,61%
6	Sumatera Selatan	717.705,48	2,22%
7	Bengkulu	34.260,16	0,11%
8	Lampung	535.529,00	1,66%
9	Kepulauan Bangka Belitung	153.386,54	0,47%
10	Kepulauan Riau	871.844,65	2,70%
11	Jakarta	2.712.670,75	8,39%
12	Jawa Barat	7.816.124,11	24,16%
13	Jawa Tengah	4.124.996,13	12,75%
14	Yogyakarta	160.049,41	0,49%
15	Jawa Timur	5.935.612,41	18,35%
16	Banten	1.954.079,12	6,04%
17	Bali	123.213,39	0,38%
18	NTB	55.777,43	0,17%
19	NTT	10.615,94	0,03%
20	Kalimantan Barat	275.182,28	0,85%
21	Kalimantan Tengah	183.459,47	0,57%

No	Provinsi	Industri Pengolahan	Kontribusi
22	Kalimantan Selatan	211.587,05	0,65%
23	Kalimantan Timur	1.312.760,07	4,06%
24	Kalimantan Utara	68.661,77	0,21%
25	Sulawesi Utara	111.471,44	0,34%
26	Sulawesi Tengah	312.784,55	0,97%
27	Sulawesi Selatan	526.837,16	1,63%
28	Sulawesi Tenggara	75.953,66	0,23%
29	Gorontalo	13.763,28	0,04%
30	Sulawesi Barat	40.261,76	0,12%
31	Maluku	20.969,29	0,06%
32	Maluku Utara	46.593,02	0,14%
33	Papua Barat	242.064,22	0,75%
34	Papua	37.066,09	0,11%
	Total	32.348.727,64	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2023

Besarnya kontribusi sektor perekonomian Provinsi Jawa Barat ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tercermin dari capaian beberapa variabel ekonomi yang belum optimal seperti pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran terbuka. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020-2022, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 45,82 juta per tahun, angka ini lebih kecil dibandingkan pendapatan per kapita nasional yang sebesar Rp63,53 juta per tahun (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 6,75, angka ini lebih tinggi dibandingkan nilai TPT nasional yang sebesar 4,91% (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di Jawa Barat yang diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian di Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, Identifikasi yang lebih mendalam terhadap sektor-sektor unggulan ini juga akan memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang lebih baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ekonomi Regional

Menurut (Wahyudi, 2008), pembangunan ekonomi merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kenaikan pendapatan masyarakat serta pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi regional/daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan ekonomi regional antara lain untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut serta mengejar ketertinggalan dengan wilayah-wilayah yang sudah maju baik dalam hal pendapatan, produktivitas, upah dan berbagai indikator ekonomi lainnya (Sodik, 2009). Masalah utama dalam pembangunan daerah terletak pada pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada di daerah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya inisiatif yang berasal dari daerah itu

sendiri dalam proses pembangunan, untuk menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Hakim, 2019). Terdapat berbagai teori dalam pembangunan ekonomi regional antara lain teori ekonomi basis (*economic base theory*), teori kutub pertumbuhan serta teori tempat sentral. Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori ekonomi basis.

Teori Basis Ekonomi

Di dalam meningkatkan perekonomian daerah teori basis ekonomi merupakan salah satu teori yang dikembangkan. (Arsyad, 1999) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah atau di kenal dengan teori basis ekonomi. Lebih lanjut, teori basis ini tersebut digolongkan ke dalam dua sektor yakni sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merujuk pada aktivitas ekspor barang dan jasa ke luar wilayah ekonomi suatu masyarakat, atau penjualan barang dan jasa kepada individu yang berasal dari luar batas ekonomi tersebut. Sedangkan, kegiatan non basis merujuk pada kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Strategi pembangunan daerah yang dikembangkan berdasarkan teori basis ini menekankan pentingnya pemberian dukungan kepada dunia usaha yang memiliki pasar baik nasional maupun internasional. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan pengurangan hambatan atau pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, baik yang sudah ada maupun yang akan didirikan di daerah tersebut (Siwi, 2017). Menurut pendapat (Muljanto, 2021) peningkatan aktivitas ekonomi di sektor basis akan mendorong peningkatan pendapatan daerah, yang kemudian berpengaruh pada kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa di sektor non-basis. Akibatnya, hal ini akan memicu ekspansi ekonomi di sektor non-basis. Sebaliknya, jika terjadi penurunan dalam kegiatan ekonomi sektor basis, pendapatan daerah akan berkurang, yang pada gilirannya menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa sektor non-basis.

Sektor Ekonomi Unggulan

Menurut Usya (2006), sektor unggulan adalah sektor yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah pada saat ini. Sambodo (2002) yang dikutip oleh Usya (2006) menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang menentukan suatu sektor dapat dianggap sebagai sektor unggulan. Adapun kriteria agar suatu sektor dapat dianggap sektor unggulan adalah: laju pertumbuhan yang tinggi, angka penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi, mempunyai keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*), mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Teknik yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan antara lain; analisis *location quotient* (LQ), analisis *shift share*, analisis model rasio pertumbuhan (MRP), dan analisis overlay

PDRB

Secara definisi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu daerah. Menurut (Gusrizal, 2022), PDRB di sebuah wilayah mencerminkan kapasitas daerah tersebut dalam menghasilkan *output* (nilai tambah) pada periode tertentu. Dalam teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pendekatan produksi atau penyediaan (PDB berdasarkan Lapangan Usaha atau industri), pendekatan pengeluaran atau permintaan akhir (PDB berdasarkan pengeluaran atau *expenditure*), dan pendekatan pendapatan (PDB berdasarkan pendapatan atau *income*).

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua (2) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan penilaian harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Penelitian ini menggunakan data harga tahun dasar tahun 2010.

Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Sedangkan Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/ pergerakan yang terjadi.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Adapun, subjek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat, sementara objek yang diteliti adalah data kuantitatif PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam miliar rupiah) periode 2010-2023. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient (LQ)* dan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Metode Location Quotient (LQ)

Menurut (Y. Wibisono, 2001), analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk mengetahui basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sector*. Location Quotient menghitung perbandingan *share output* sektor i di kota atau kabupaten dan *share out* sektor i di provinsi (R. Jumiyan, 2018). Teknik LQ merupakan pendekatan yang sering kali digunakan untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan suatu wilayah. Adapun dasar pembahasannya sering kali difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Penelitian ini akan menggunakan perhitungan LQ dengan pendekatan pendapatan untuk menentukan sektor basis di Provinsi Jawa Barat dengan formula sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV_i}$$

Keterangan

LQ : Indeks/kofisien *Location Quotient* dari sektor i di Provinsi Jawa Barat

X_{ij} : PDRB sektor i di Provinsi Jawa Barat

X_i : PDB sektor i di Indonesia

RV_j : Total PDRB Provinsi Jawa Barat

RV_i : Total PDB Indonesia

Interpretasi dari perhitungan LQ antara lain:

- $LQ > 1$ artinya, komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di Provinsi Jawa Barat akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
- $LQ = 1$ komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Jawa Barat dan tidak mampu untuk diekspor.
- $LQ < 1$ komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di Provinsi Jawa Barat tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar

Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan karena mempunyai beberapa kelebihan seperti penggunaannya yang cukup mudah dan sederhana serta dapat digunakan sebagai analisis awal serta dapat dilengkapi dengan alat analisis yang lain. Selain itu, perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat dilihat dengan membandingkan nilai LQ dari tahun ke tahun (R. Jumiyanti, 2018). Namun, metode LQ juga mempunyai beberapa keterbatasan yakni bersifat statis dan hanya digunakan untuk mengestimasi perubahan sektor unggulan pada tahun tertentu saja (Muhammad Alwi et al., 2021). Untuk mengatasi keterbatasan metode LQ statis, maka akan digunakan gabungan antara metode LQ Dinamis (DLQ) yang mampu mengakomodasi perubahan struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Dynamic Location Quotient (DLQ)

Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan modifikasi dari metode SLQ dimana dalam metode DLQ memperhitungkan faktor laju pertumbuhan sektor dari waktu ke waktu. Analisis DLQ digunakan untuk memprediksi pergeseran sektor-sektor unggulan di masa depan, serta untuk menentukan apakah sektor-sektor yang saat ini unggul dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pendorong perekonomian (sektor basis) akan tetap menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Sehingga hal tersebut dapat menggambarkan dinamika sektor yang terjadi pada suatu wilayah. Adapun rumus perhitungan DLQ menurut (Widodo, 2006) adalah sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

Keterangan:

DLQ_{ij} : Indeks potensi sektor i Provinsi Jawa Barat

g_{ij} : Laju pertumbuhan nilai PDRB sektor i di Provinsi Jawa Barat

g_j : Rata-rata laju pertumbuhan nilai sektor i di Provinsi Jawa Barat

G_i : Laju pertumbuhan nilai PDB sektor i Nasional

G : Rata-rata laju pertumbuhan PDB sektor i

t : Selisih tahun akhir dan tahun awal

IPPS_{ij} : Indeks potensi perkembangan sektor i di Provinsi Jawa Barat

IPPS_i : Indeks potensi perkembangan sektor i Nasional

X_{it} : Nilai PDRB pada tahun t

X_{io} : Nilai PDRB pada tahun awal

Interpretasi nilai DLQ yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai DLQ > 1 artinya bahwa sektor i di Provinsi Jawa Barat berkembang lebih cepat daripada perkembangan sektor yang sama di level nasional

2. Jika nilai $DLQ < 1$ artinya bahwa sektor i di Provinsi Jawa Barat berkembang lebih lambat daripada perkembangan sektor yang sama di level nasional

Kemudian, dalam menentukan sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2012) dalam (E. Wibisono et al., 2019), yakni membuat klasifikasi sektor berdasarkan analisis gabungan nilai SLQ dan DLQ yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Berdasarkan Analisis Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

Kriteria	SLQ>1	SLQ<1
DLQ>1	Sektor Unggulan	Sektor Andalan
DLQ<1	Sektor Prospektif	Sektor Tertinggal

Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui bahwa sektor unggulan dengan syarat $DLQ > 1$ dan $LQ > 1$, merupakan sektor pada saat ini merupakan sektor unggulan dan tetap unggul pada beberapa tahun ke depan. Untuk sektor andalan dengan syarat $DLQ > 1$ dan $LQ < 1$ merupakan sektor yang saat ini belum unggul tetapi dalam beberapa waktu ke depan berpotensi unggul. Untuk sektor prospektif dengan syarat $LQ > 1$ dan $DLQ < 1$ sektor yang pada saat ini unggul tetapi tidak berpotensi unggul pada beberapa tahun ke depan, sedangkan sektor tertinggal dengan syarat $LQ < 1$ dan $DLQ < 1$ dinyatakan tidak unggul untuk saat ini dan pada beberapa waktu ke depan pun belum berpotensi untuk menjadi sektor unggulan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dibahas hasil analisis mengenai keunggulan komparatif sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Barat melalui dua pendekatan, yaitu Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Analisis LQ bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, sementara DLQ digunakan untuk melihat perubahan keunggulan komparatif sektor-sektor tersebut dari waktu ke waktu. Kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan potensi perekonomian Jawa Barat.

Analisis Location Quotient

Provinsi Jawa Barat memiliki 17 sektor lapangan usaha. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat berdasarkan perbandingan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat nasional. Sektor basis ini menunjukkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3. Hasil Analisis LQ di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LQ rata-rata	Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,71	0,67	0,64	0,64	0,62	0,60	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,55	0,58	0,61	non basis
Pertambangan & Penggalian	0,32	0,29	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21	0,18	0,19	0,24	non basis
Industri Pengolahan	1,81	1,82	1,80	1,81	1,81	1,81	1,80	1,81	1,81	1,81	1,79	1,78	1,66	1,80	1,79	basis
Peng. Listrik dan Gas	1,93	1,83	1,89	1,97	1,95	1,83	1,84	1,61	1,53	1,46	1,44	1,56	1,43	1,48	1,70	basis
Peng Air; Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,84	0,84	0,87	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	0,92	0,98	1,03	0,95	1,02	0,92	non basis
Konstruksi	0,73	0,77	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80	0,81	0,82	0,82	0,81	0,83	0,74	0,81	0,80	non basis

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LQ rata-rata	Kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,14	1,14	1,18	1,16	1,14	1,14	1,12	1,10	1,08	1,09	1,07	1,05	0,94	1,01	1,10	basis
Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,19	1,20	1,17	1,17	1,19	1,20	1,18	1,16	1,16	1,31	1,26	1,10	1,19	1,19	basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81	0,81	0,88	0,85	0,78	0,84	0,81	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,59	0,65	0,64	0,63	0,67	0,71	0,74	0,76	0,76	0,76	0,90	0,91	0,84	0,92	0,75	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,64	0,64	0,63	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,63	0,62	0,65	0,58	0,63	0,64	non basis
Real Estat	0,37	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,40	0,42	0,42	0,46	0,42	0,48	0,40	non basis
Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,21	0,23	0,22	0,24	0,25	non basis
Adm Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,69	0,62	0,63	0,61	0,58	0,58	0,58	0,59	0,57	0,57	0,54	0,53	0,47	0,51	0,58	non basis
Jasa Pendidikan	0,67	0,71	0,75	0,76	0,81	0,83	0,84	0,87	0,86	0,85	0,89	0,88	0,82	0,90	0,82	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,60	0,60	0,60	0,64	0,68	0,68	0,69	0,70	0,71	0,62	0,66	6,50	0,62	1,07	basis
Jasa Lainnya	1,10	1,16	1,18	1,18	1,19	1,21	1,22	1,24	1,23	1,22	1,27	1,27	1,15	1,23	1,20	basis
Produk Domestik Regional Bruto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (hasil pengolahan data), 2023

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ yakni sektor industri pengolahan (1,79), pengadaan listrik dan gas (1,69), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (1,09), transportasi dan pergudangan (1,18), jasa kegiatan dan sosial serta jasa lainnya (1,06) serta sektor jasa lainnya (1,20). Hal tersebut menandakan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor basis di Provinsi Jawa Barat, $LQ > 1$. Artinya sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai $LQ < 1$ yang menandakan bahwa sektor tersebut adalah sektor non basis di Provinsi Jawa Barat.

Jika dilihat dari perkembangan nilai LQ sepanjang periode tahun 2010-2023, sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ secara konsisten ialah sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta sektor transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Sektor lainnya, yakni sektor perdagangan besar dan eceran juga cenderung selalu memiliki nilai $LQ > 1$ kecuali pada tahun 2022 dimana nilai LQ pada sektor tersebut adalah 0,93 atau di bawah 1. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022, daya beli masyarakat melemah karena adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang cukup terdampak karena adanya hal tersebut. Hal ini juga tercermin dari nilai LQ yang semakin menurun dari periode 2020-2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023. Sedangkan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya memiliki nilai $LQ < 1$ selama periode tahun 2010-2023 kecuali pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 tersebut sektor jasa kesehatan dan kegiatan lainnya mengalami peningkatan permintaan yang signifikan akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan, termasuk perawatan terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap perekonomian daerah meningkat, sehingga nilai LQ sektor tersebut lebih besar dari 1 pada tahun 2022.

Sektor lainnya yakni sektor pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan jasa komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor non basis.

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat berdasarkan perubahan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat nasional. DLQ memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang mengalami peningkatan atau penurunan keunggulan komparatif

Tabel 4. Hasil Analisis DLQ di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

No	Sektor	DLQ (rata-rata)	Kategori
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,0278	cepat
2	Pertambangan dan Pengalihan	1,0587	cepat
3	Industri Pengolahan	1,0061	cepat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,1151	cepat
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,0223	cepat
6	Konstruksi	1,0559	cepat
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,0190	cepat
8	Transportasi dan Pergudangan	1,1852	cepat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,0772	cepat
10	Informasi dan Komunikasi	1,2829	cepat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,0292	cepat
12	Real Estat	1,0852	cepat
13	Jasa Perusahaan	1,1713	cepat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,0521	cepat
15	Jasa Pendidikan	1,0537	cepat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1681	cepat
17	Jasa Lainnya	1,0386	cepat

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), seluruh sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai $DLQ > 1$, artinya seluruh sektor perekonomian di Provinsi Jawa Barat memiliki perkembangan atau pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional. Adapun sektor dengan rata-rata nilai DLQ paling tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (1,28), transportasi dan pergudangan (1,1852), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,16).

Analisis Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

Hasil analisis LQ dan DQ kemudian digabungkan untuk kemudian dianalisis dan dijadikan basis untuk menentukan klasifikasi sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis gabungan LQ dan DLQ di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2023 disajikan pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Gabungan SLQ dan DLQ Sektor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2023

No	Sektor	SLQ (Rata-Rata)	DLQ (Rata-Rata)	Kategori Sektor	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,61	1,02	andalan	SLQ<1, DLQ>1
2	Pertambangan dan Penggalian	0,24	1,05	andalan	SLQ<1, DLQ>1
3	Industri Pengolahan	1,79	1,00	unggulan	SLQ>1, DLQ>1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,69	1,11	unggulan	SLQ>1, DLQ>1
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,92	1,02	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
6	Konstruksi	0,79	1,05	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,09	1,01	Unggulan	SLQ>1, DLQ>1
8	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,18	Unggulan	SLQ>1, DLQ>1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	1,07	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
10	Informasi dan Komunikasi	0,74	1,28	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	1,02	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
12	Real Estat	0,40	1,08	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
13	Jasa Perusahaan	0,24	1,17	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,57	1,05	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
15	Jasa Pendidikan	0,81	1,05	Andalan	SLQ<1, DLQ>1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,16	Unggulan	SLQ>1, DLQ>1
17	Jasa Lainnya	1,20	1,03	Unggulan	SLQ>1, DLQ>1

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

Berdasarkan hasil analisis gabungan LQ dan DLQ maka terdapat dua klasifikasi sektor di Provinsi Jawa Barat yaitu sektor unggulan dan sektor andalan. Sektor yang memiliki nilai SLQ>1 dan DLQ>1 termasuk kedalam sektor unggulan. Beberapa sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil analisis gabungan SLQ dan DLQ diantaranya **industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya**. Hal tersebut menandakan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat dan pada masa mendatang berpotensi untuk tetap menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sektor yang termasuk ke dalam sektor andalan adalah sektor yang memiliki nilai SLQ<1 dan DLQ>1, sektor tersebut diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa Pendidikan. Artinya, meskipun sektor-sektor tersebut merupakan sektor non unggulan di Provinsi Jawa Barat, sektor tersebut memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat. Hasil perhitungan SLQ dan DLQ kemudian disajikan ke dalam sebuah t matriks klasifikasi sektor berdasarkan kriteria perhitungan SLQ dan DLQ sebagai berikut:

Tabel 6. Pengelompokan Sektor Atas Analisis Gabungan LQ dan DLQ di Provinsi Jawa Barat

Kriteria	SLQ>1	SLQ<1
DLQ>1	Sektor Unggulan Industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya	Sektor Andalan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan. Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan
DLQ<1	Sektor Prospektif -	Sektor Tertinggal -

Profil Sektor Unggulan Berdasarkan Lapangan Usaha

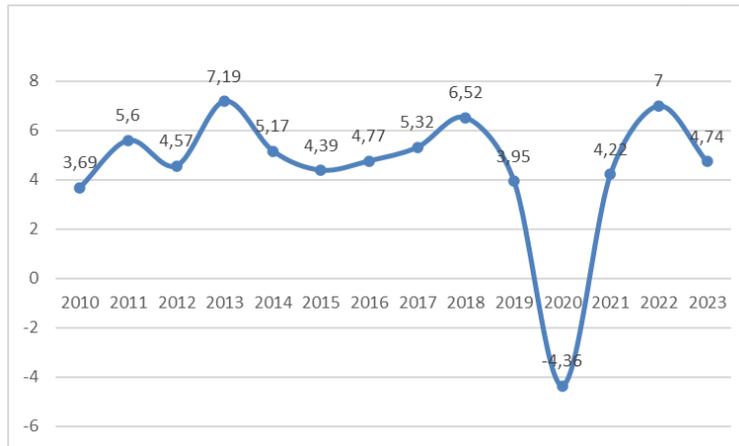
Berdasarkan hasil gabungan LQ dan DLQ didapatkan beberapa sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat. Pembahasan ini akan menyajikan profil sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil gabungan LQ dan DLQ yang terdiri dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tidak dimasukkan ke dalam pembahasan meskipun hasil analisis LQ dan DLQ menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan. Hal tersebut disebabkan karena perhitungan LQ untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial berpotensi menghasilkan bias karena pelayanan terhadap jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat tajam seiring adanya pandemi COVID-19.

Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan hasil analisis gabungan LQ dan DLQ, sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB Jabar dengan rata-rata kontribusi sebesar 43,18% selama periode 2010-2023.

Sepanjang periode 2010-2023, sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat terus mengalami fluktuasi, dengan capaian laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 (7,19%) dan tahun 2022 (7,00%). Namun demikian, rata-rata laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat pada periode yang sama tercatat tetap lebih tinggi (4,54%) dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional. Sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat terutama ditopang beberapa sub-sektor antara lain antara lain sub sektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan (22,81%), industri alat angkutan (19,22%), industri tekstil dan pakaian jadi (14,35%) serta industri makanan dan minuman (10,72%).

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat terus tumbuh seiring dengan tingginya realisasi investasi di sektor industri pengolahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2023), sektor industri pengolahan menjadi sektor yang mendominasi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat baik investasi PMA ataupun PMDN. Realisasi investasi sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat mencapai Rp103,6 T atau setara dengan 49,2% dari total realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat.

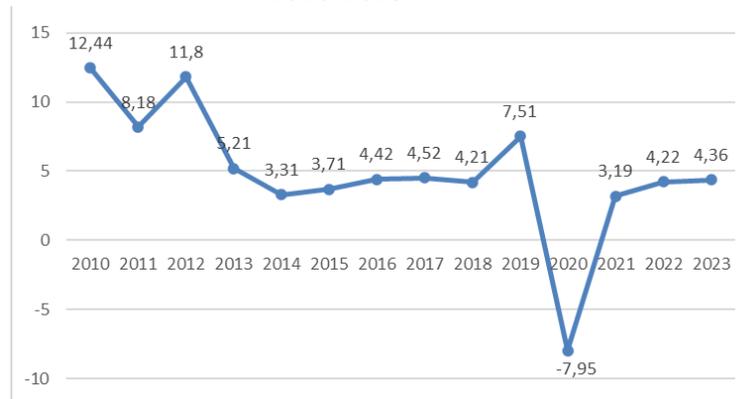
Pengadaan Listrik dan Gas

Rata-rata kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2010-2023 adalah sebesar 0,44%. Secara laju pertumbuhan, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2010-2023. Sektor pengadaan listrik dan gas salah satunya didorong oleh konsumsi listrik masyarakat Provinsi Jawa Barat. Tercatat, pada tahun 2023, konsumsi listrik masyarakat di Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi di tingkat nasional dengan persentase sebesar 20,30% (PT. PLN, 2023)

Perdagangan besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda motor

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, sektor perekonomian lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Jawa Barat adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 15,33%. Laju pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan selama periode 2010-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,94%. Penurunan laju pertumbuhan paling signifikan tercatat pada tahun 2020 salah satunya terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat rendahnya daya beli masyarakat yang terjadi saat pandemi COVID-19. Adapun, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan 2012 (11,8%), 2019 (7,51%) serta terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021-2023 seiring dengan membaiknya perekonomian pasca pandemi COVID-19.

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Jawa Barat Tahun 2010-2023



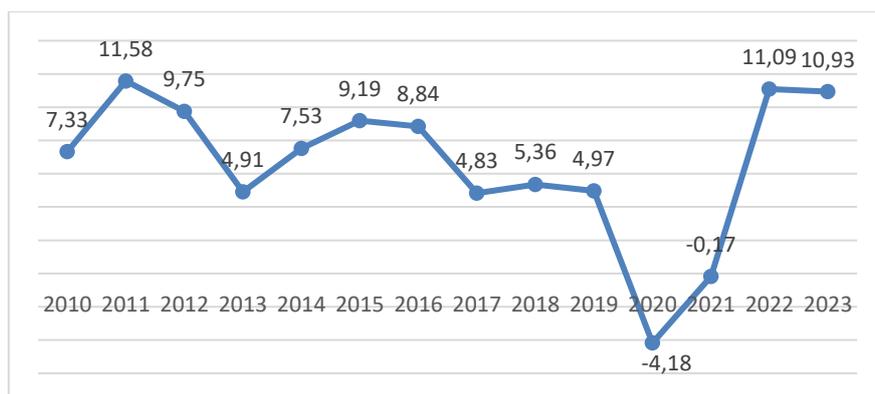
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sub-sektor yang memberikan kontribusi paling besar bagi sektor perdagangan besar dan eceran adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 86,78%. Sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan motor tercermin tumbuh seiring dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB berdasarkan pengeluaran, dengan persentase sebesar (62,29%).

Transportasi dan pergudangan

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, selama periode tahun 2010-2023 sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi sebesar 5% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat. Sedangkan laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan selama periode 2010-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,57%.

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada awalnya peran transportasi hanya untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring perkembangan waktu, sistem transportasi berperan penting sebagai sarana bagi sistem produksi untuk memperlancar arus barang (Kemenkeu, 2021). Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan di Provinsi Jawa Barat tak lepas dari pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan

besar dan eceran karena sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor penunjang bagi sektor-sektor lainnya. Besarnya potensi sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran di Provinsi Jawa Barat menjadi peluang positif yang dapat mendorong laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan.

Sub sektor transportasi dan pergudangan meliputi angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Sub-sektor angkutan darat menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 94%.

Jasa lainnya

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, rata-rata kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB adalah sebesar 2,07%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhannya adalah sebesar 8,28%.

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Lainnya



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki banyak kawasan industri dan pusat ekonomi yang berkembang, sehingga membutuhkan berbagai layanan jasa profesional dan teknis yang mendukung aktivitas bisnis, perdagangan, dan industri.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat dimana sektor-sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$ dan nilai $DLQ > 1$. Artinya, sektor lapangan usaha tersebut pada saat ini merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat dan akan tetap unggul pada beberapa tahun ke depan. Sektor yang termasuk sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat antara lain sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan keunggulan sektor-sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat, seperti kebijakan pemerintah, investasi, dan perkembangan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah), 2020*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoQIRVZzNiMU5qU1VOSIRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2020>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2024*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. (2023). *LAPORAN REALISASI INVESTASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023*.
- Gusrizal. (2022). *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu*.
- Hakim, A. (2019). Sektor Unggulan Dan Pergeseran Sektor Regional Kabupaten Gresik 2011-2017 Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Regional. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(2), 126–152. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.126-152>
- Kemenkeu. (2021). *Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat Tahunan 2021*. https://djp.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2021/10_Jawa_Barat.pdf
- Muhammad Alwi, Putu Karismawan, & I Dewa Ketut Yudha S. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Saat Ini Dan Di Masa Depan Dalam Upaya Pengurangi Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 66–81. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.69>
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181.
- Nur, I., & Rakhman, M. T. (2019). Analisis Pdrb Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi DKI Jakarta. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 351–370. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.132>
- PT. PLN. (2023). *Statistik 2 pln 3. 03001–25(03001)*, 1–102.
- R. Jumiyan, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>
- Siwi, H. F. D. (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18, No.6, 1–11. <https://www.mendeley.com/library/>
- Sodik, J. (2009). Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Analisis Konvergensi Antar Propinsi di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 6. <https://doi.org/10.20885/ejem.v1i1.570>
- Suranny, L. E. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Wonogiri. *Inisiasi*, 85–94. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v10i2.97>
- Wahyudi, S. T. (2008). Penguatan Sektor-Subsektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan

- Pembangunan Ekonomi Daerah. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(Mei), 22–42.
- Wibisono, E., Amir, A., & Zulfanetti, Z. (2019). Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(2), 105–116. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.2.105-116>
- Wibisono, Y. (2001). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1(2).
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta UPP STIM YKPN 2006.